

BPKH Bantu Korban Bencana di Kabupaten Bogor

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima bantuan langsung tunai dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Pusat yang dipertukarkan bagi korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan. Bantuan diterima langsung oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, Selasa (5/7).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan oleh BPKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pasca bencana alam longsor dan banjir bandang di Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan, karena pasca bencana masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, infrastruktur dan lainnya.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan dari BPKH Pusat, bantuan dari para relawan dan donatur sangat membantu dalam memulihkan masyarakat pasca bencana, serta dapat menyembuhkan mental mereka," ujar Plt. Bupati Bogor.

Iwan Setiawan menyatakan bahwa, kolaborasi yang dilakukan antara Rumah Zakat dengan BPKH sangat baik untuk bersama-sama membantu para korban bencana alam di dua kecamatan beberapa waktu lalu. "Kami sangat menunggu bantuan dari para donatur dan relawan, tentunya apa yang dilakukan oleh BPKH sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat di Kabupaten Bogor," tuturnya.

Selanjutnya, Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji, Rahmat Hidayat menuturkan bahwa,

bantuan diberikan sebagai bentuk komitmen BPKH dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan, yang dilakukan secara kolaborasi dengan Rumah Zakat. Bantuan diberikan untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan dapur, makanan, logistik kesehatan, perlengkapan ibu, bayi dan sebagainya.

"Dananya kami transfer ke rumah zakat, nanti rumah zakat yang membelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jadi Pemkab Bogor terima bersih. Bantuan ini termasuk dalam program kemashlahatan umat keaduratan bencana," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Chief Program Officer (CPO) Rumah Zakat, Murni Alit Baginda menambahkan, banyak aksi respon bencana alam selalu didukung penuh oleh BPKH diseluruh Indonesia termasuk respon tanggap bencana alam di Kabupaten Bogor. Rumah Zakat hadir berkolaborasi dengan BPKH berupaya memberikan sumbangsih yang bermanfaat kepada masyarakat, salah satunya bagi para korban bencana alam di Pamijahan dan Leuwiliang.

"Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini, akan kami segera salurkan dan bisa memberikan manfaat kepada para korban bencana di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tim relawan kami juga sejak kejadian sudah ada di lokasi membantu para korban bencana, dan akan terus mendampingi sampai penanganannya pasca bencana selesai dilakukan," tandasnya. ● **gio**

Pemkot Bandung Anggarkan Rp89 Miliar untuk Siswa RMP

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan Rp 89.482.780.000 untuk siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Sedangkan untuk bantuan RMP bagi siswa SD-SMP berupa barang, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan sebesar Rp 21.908.880.000, Bansos RMP siswa SD-SMP berupa uang sebesar Rp 57.528.900.000. Ditambah anggaran RMP untuk perguruan tinggi berupa uang berjumlah Rp 10.045.000.000.

Sehingga total bantuan RMP berupa uang dari tingkat SD-SMP dan perguruan tinggi berjumlah Rp 67.573.900.000 dengan total keseluruhan RMP uang dan barang di 2022 berjumlah Rp 89.482.780.000. Bantuan uang untuk siswa RMP jenjang SD dan SMP kata dia, akan disalurkan sebesar Rp 980 ribu per orang per tahun untuk siswa sekolah dasar. Sedangkan siswa SMP akan mendapatkan jatah Rp 1,2 juta per tahun per orangnya. Dengan harapan mampu memudahkan anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan.

"Selain bantuan berupa uang untuk RMP siswa yang bersekolah di SD dan SMP Swasta juga diberi bantuan berupa barang yang terdiri atas dua stel Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS) SD/SMP, sepatu, tas sekolah, sepasang sepatu, sepasang kaos kaki. Bantuan ini juga berlaku bagi siswa RMP di SD dan SMP Negeri," sambung Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tiantan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (6/7).

Dia mengatakan, Kota

Bandung memiliki cukup banyak blind spot, terutama di daerah Sukajadi, Ujungberung dan Gedebage. Maka dari itu, Disdik tengah mengupayakan pembangunan dua gedung SMP baru dari 16 SMP filial yang ditargetkan. "Tahun ini dibangun dua bangunan filial dari 16 sekolah, jadi tinggal 14 lagi. Tapi mudah-mudahan 2023 bisa mengusulkan beberapa lokasi aset tanahnya," ungkapnya.

"Kami juga sedang memfasilitasi SMP yang blind spot daerah-daerah yang masih pemerataan akses terutama aksesnya untuk SMP mudah-mudahan di tahun ini alokasi sudah dapat di Sukajadi, karena jauh ke sana ke sini," sambungnya.

Ia menambahkan, kerja sama dilakukan di Sekolah Dasar swasta dengan jumlah total 185 sekolah. Sementara untuk SMP total berjumlah 129 sekolah swasta. Di Kota Bandung sendiri, terdapat 274 SD Negeri dan 75 SMP negeri. "Penambahan delapan hingga sembilan SMP, kemarin kita kekurangan sekolah untuk SMP. Jadi dibuatkan 16 SMP filial, artinya adalah pendidikan SMP tapi bangunannya disatukan dengan SMP yang ada, atau SD terdekat. Untuk apa? Untuk peningkatan akses pendidikan SMP karena banyak di daerah-daerah yang sekolah pertamanya kurang," terangnya.

"Kalau memang masih ada RMP yang tidak ikut PPDB, masyarakat diharapkan dapat laporan ke Disdik, kami akan fasilitasi agar mereka bersekolah," imbuhnya. ● **pur**

IDN/ANTARA



PESANTREN KILAT SAAT LIBURAN SEKOLAH

Sejumlah siswa mengikuti pesantren kilat di Pusdai, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/7). Sebanyak 120 siswa dari berbagai sekolah di Bandung Raya dan Jakarta mengikuti pesantren kilat yang diadakan oleh Taqiyah Belajar Quran bersama Pusdai Jawa Barat guna mengisi waktu luang pada saat liburan sekolah dengan belajar Al Quran dan ilmu agama.

Warga Depok Raih Juara Pertama Keluarga Teladan se-Jabar

DEPOK (IM)- Pasangan suami istri, Asy'ari dan Kristianawati berhasil meraih juara pertama Keluarga Teladan se-Jawa Barat yang merupakan rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas). Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono di Depok, Rabu (6/7) mengatakan Asy'ari dan istrinya Kristianawati meraih juara pertama tingkat Jabar sangat baik, karena berhasil unggul melawan 27 kota dan kabupaten se-Jabar. "Selamat untuk Kota Depok khususnya Bapak Asy'ari dan Ibu Kristianawati, warga Cilodong yang sudah membawa nama baik Depok dalam lomba keluarga teladan tingkat Jabar. Semoga bisa menjadi contoh untuk semua keluarga di Kota Depok," katanya.

Dalam lomba itu, Kota Depok berhasil meraih juara pertama. Disusul juara kedua yang berhasil disabet Kota Cimahi, Kabupaten

Kuningan dan juara harapan diraih Kota Cianjur. "Tentu prestasi ini semata karena kerja sama serta sinergisitas semua pihak, sehingga program Ketahanan Keluarga di Kota Depok dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Ely Fanda mengungkapkan kebanggaan atas capaian yang diraih Keluarga Asy'ari. Hal ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Depok benar-benar komitmen dalam mewujudkan kota berketahanan keluarga. "Selamat atas penobatan Bapak Asy'ari dan Ibu Kristianawati sebagai Keluarga Teladan Jabar, ini menjadi motivasi bagi keluarga-keluarga lainnya, dan sebagai upaya agar semua keluarga di Kota Depok menjadi keluarga yang teladan," tuturnya. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PELEPASAN ESKPOR SERPIH PORANG KE TIONGKOK

Sejumlah orang mengambil gambar saat pelepasan ekspor serpih porang kering atau konjac chips di PT Asia Prima Konjac (APK) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (6/7). PT APK mengeksport 162 ton serpih porang kering ke Tiongkok setelah selama masa pandemi COVID-19 tidak melakukan kegiatan ekspor.

Digugat Warga Perumahan Sentul City, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan Siap

Kami siap menghadapi persidangan di PTUN Bandung, gugatan tersebut akan menjadi dasar Pemkab Bogor menagih PSU ke pihak pengembang (PT Sentul City Tbk), kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

BABAKAN MADANG

(IM)- Digugat lagi oleh warga Perumahan Sentul City terkait dugaan tidak dilakukannya secara baik penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh PT. Sentul City Tbk, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan angkat bicara.

Iwan Setiawan mengaku siap menghadapi gugatan warga Perumahan Sentul City tersebut, melalui peradilan tata usaha negara (PTUN) Bandung, gugatan tersebut akan menjadi dasar pihaknya menagih PSU tersebut ke pihak pengembang.

"Kami siap menghadapi persidangan di PTUN Bandung, gugatan tersebut akan

menjadi dasar Pemkab Bogor menagih PSU ke pihak pengembang (PT Sentul City Tbk)," kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu (6/7).

Politisi Partai Gerindra tersebut akan mengumpulkan data PSU yang sudah atau belum diserahkan ke pihaknya, seperti lahan yang dijadikan bangunan sekolah, tempat pemakaman umum (TPU) dan lainnya.

"Yang saya tau ada lahan PSU yang dijadikan sekolah, namun seperti jalan dan taman sepengetahuan saya belum diserahkan oleh pengembang," sambungnya.

Terkait belum adanya angkutan umum ke desa sekitar perumahan Sentul City, Iwan sapaan akrabnya mengakui memang belum ada trayek angkutan umum ke sana karena mempertimbangkan estetika.

"Kalau angkutan umum model angkot, kurang pantas kalau lewat perumahan tersebut. Kami berpikir, bahwa mode transportasi yang cocok ke desa sekitar adalah bus atau angkutan perintis. Pertimbangan lain kalau masalah jalan, ialah Pemkab Bogor harus menganggarkan biaya perawatan jalan di Kawasan Sentul City," tutur Iwan.

Sebelumnya, Bupati Bogor kembali digugat oleh warga Perumahan Sentul City ke PTUN Bandung, gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan Nomor Register Perkara: 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg, tertanggal 27 Mei 2022 tersebut,

Gugatan warga Perumahan Sentul City ini merupakan gugatan kesekian kalinya kepada Pemkab Bogor untuk menuntut haknya sebagai warga.

Setelah sebelumnya berhasil menuntut hak atas airnya, kali ini warga mengajukan gugatan karena sikap diam atau tidak pro aktifnya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meminta, memverifikasi, mengelola, membina dan mengawasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City.

Sebagaimana diatur dalam Permenagri No. 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah dan Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2012 tentang PSU Perumahan dan Permukiman, Penyerahan PSU Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan. "Faktanya hingga saat gu-

gatan diajukan, PSU di Kawasan tersebut masih dikuasai bahkan dicatat sebagai milik pengembang yakni PT Sentul City Tbk," ucap kuasa hukum penggugat Alghiffari Aqsa Amar.

Padahal, sambung Alghiffari Aqsa Amar. Pembangunan Kawasan Perumahan Sentul City tersebut telah berlangsung sejak 28 tahun lalu atau tepatnya di Tahun 1994.

"Selain tidak menikmati fungsi PSU di Kawasan Sentul City, beberapa PSU yang dijanjikan pengembang tidak kunjung dibangun, warga juga masih ditagih pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) oleh PT Sentul City Tbk. Padahal terdapat Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan PT Sentul City Tbk tidak berhak untuk menarik BPPL dari warga di seluruh kawasan perumahan Sentul City karena merupakan perbuatan melawan hukum," sambung Alghiffari Aqsa Amar. ● **pra**

Sekda Kab. Bogor Ingin IWAPI Ikut Percepat Pemulihan Ekonomi

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin, berkeinginan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ikut giat percepatan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kepada pengusaha mikro dan makro di Kabupaten Bogor.

"Kami minta kepada DPC IWAPI Kabupaten Bogor yang baru dilantik ikut menggerakkan pemulihan ekonomi kecil mikro menengah pasca pandemi Covid-19, " tegas Sekda Kabupaten Bogor, Burhanuddin, saat sambutan pelantikan DPC IWAPI Kabupaten Bogor, di Gedung Serbaguna Cibinong, Rabu (6/7).

Hal itu, menurut Burhanuddin yang mewakili Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, bahwa IWAPI bagian dari mitra kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dengan demikian kehadirannya, sudah barang tentu ikut giat membantu pengusaha Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) bagian

terpenting sektor ekonomi di Kabupaten Bogor.

Burhanuddin menegaskan, IWAPI terus maju berperan aktif di bidang usaha, hal ini sejalan dengan proses percepatan ekonomi di Bogor, sebab IWAPI selama ini ikut berperan partisipasi ke UMKM.

Menurutnya, peran selama ini kepada Pemkab Bogor agar ditingkatkan. Potensi selama ini belum dilakukan secara optimal. Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Jawa Barat, DR Hj Masrura Ram Ijal, SE, MBA, mengakui bahwa IWAPI yang dipimpin oleh Inne Roswiani menjadi IWAPI terbaik ke Jawa Barat.

IWAPI se Jawa Barat berjumlah sekitar 3000 orang, selama ini mengembangkan mikro usaha kecil dan menengah, kata Ketua IWAPI Jawa Barat Masrura Ram Ijal, saat melantik Ketua DPC dan pengurus IWAPI Kabupaten Bogor pimpinan Inne Roswiani

SE periode 2022-2026.

Sesuai dilantik, Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor, Inne Roswiani SE, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua undangan yang hadir.

Inne panggilan akrabnya, akan melakukan inovatif pada pengembangan usaha kecil menengah. Apa yang selama ini dicapai akan terus ditingkatkan sesuai dengan tema "Berakselerasi Menuju IWAPI Maju.

Di samping itu, dia menjanjikan, akan berkolaborasi dengan semua pihak, bahkan akan terus berkontribusi di Pemkab Bogor.

Hal senada disampaikan Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Chekawati bahwa selama ini IWAPI sudah menunjukkan eksistensi saat pandemi Covid-19 lalu, cukup berat namun IWAPI masih tegar untuk berkiprah.

Oleh karena itu, Sintha mengajak IWAPI untuk ikut kontribusi di sektor lain. ● **gio**



Inne Roswiani SE bersama DPD IWAPI Jabar, DR Hj Masrura Ram Ijal SE MBA.

Masuk Mal di Kota Bandung, Kini Wajib Vaksin Booster

BANDUNG (IM)- Pemkot Bandung kini mewajibkan pengunjung yang masuk ke mal harus sudah divaksin dosis ketiga atau booster.

Selain ke mal, pengunjung yang masuk ke ruang publik lainnya seperti hotel, stasiun, bandara dan terminal wajib sudah divaksin booster.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pemerintah kota terus berupaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 subvarian baru BA.4 dan BA.5. Salah satu yang dilakukan yaitu mensyaratkan masyarakat yang berkunjung ke ruang publik wajib sudah divaksin booster.

"Untuk percepatan vaksinasi ini akan melakukan perubahan Perwal, mensyaratkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang akan hadir di ruang publik, seperti di stasiun, bandara, terminal, hotel, mal dan aktivitas lain disyaratkan bahwa mereka harus sudah mendapatkan vaksin ketiga," kata Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Rabu (6/7).

Disampaikan Yana Mulyana, pemerintah kota akan menyiapkan gerai-gerai vaksinasi di ruang-ruang publik

untuk memudahkan masyarakat yang belum divaksin agar divaksin. Selain itu aplikasi PeduliLindungi menjadi alat untuk melakukan pengawasan.

"Melalui PeduliLindungi, akan menjadi tahu kondisi orang-orang yang akan hadir di ruang publik dengan harapan pihak TNI Polri dan dinas terkait akan melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga, ikhtiar mencegah penyebaran Covid-19," ucapnya.

Yana menambahkan, pihaknya lebih cepat menerapkan kebijakan tersebut dari pemerintah pusat yang berencana memberlakukan dua pekan ke depan karena mobilitas masyarakat di Bandung relatif tinggi. Peningkatan kasus Covid-19 pun saat ini terjadi.

"Kota Bandung penduduk 2,5 juta malam kalau siang 3,7 juta, kita risiko lebih tinggi karena aglomerasi, kota metropolitan. Kalau bisa lebih cepat mengatasi lewat regulasi yang ditetapkan saya pikir jauh lebih baik. Level 1 alhamdulillah, kapasitas sampai saat ini kita lakukan 75 persen tetap tidak ada perubahan di Peral yang akan diterbitkan termasuk jam operasional," ujar dia. ● **pur**

Warga Kota Bogor Diminta tidak Gunakan Kantong Plastik

BOGOR (IM)- Pemkot Bogor mengimbau warga Kota Bogor agar tidak memakai kantong plastik sebagai bungkus daging hewan kurban. Gantinya, gunakan besek atau daun pisang.

Plh Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan, sebenarnya kebijakan tersebut sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kepada warga khususnya panitia penyelenggara kurban, untuk menggunakan besek atau daun pisang dalam pendistribusian daging hewan kurban.

Dia menyebutkan, di Kota Bogor sejak 2019 itu imbauan terkait hal itu tertuang dalam surat bernomor: 658.1/1866-DLH. Dalam surat tersebut, setiap panitia pelaksanaan kurban untuk melaksanakan pendistribusian daging hewan kurban dengan tidak menggunakan kantong plastik hitam atau kantong plastik sekali pakai sebagai wadah.

"Alternatif pengganti kantong plastik, bisa menggunakan daun pisang, besek, atau membawa wadah sendiri," kata Dedie, Rabu (6/7). ● **gio**